islamsantun.org issn: 2746-0657

Dialog Kebijakan Nasional Pertemukan Aktivis Lintas Iman hingga Pemerintah Atasi Krisis Ekologi

Oleh: islamsantun | Tanggal Upload: 26 November 2026



Jakarta – Jaringan GUSDURian bersama International Dialogue Centre KAICIID (The King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue) menggelar Dialog Kebijakan Nasional dengan tema "Penguatan Kerja Sama Multipihak untuk Aksi Lingkungan Berbasis Lintas Iman: Dari Praktik Baik Akar Rumput Menuju Kebijakan Nasional" di Novotel Jakarta Cikini, Jakarta Pusat, Selasa-Rabu (24-25 November 2026).

Forum ini mempertemukan lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, penghayat kepercayaan, masyarakat adat, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil pegiat lingkungan guna mengonsolidasikan aksi ekologi lintas iman menyambungkannya dengan tata kelola kebijakan nasional.

Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid menyampaikan bahwa selama sekitar empat tahun terakhir, jejaringnya turut menggarap isu-isu kelestarian lingkungan melalui program Jejaring Agama untuk Gerakan Alam dan Toleransi (JAGAT) yang tersebar di berbagai daerah. Langkah tersebut berakar pada pandangan bahwa krisis lingkungan berdampak langsung

terhadap kemanusiaan.

”Kita bersama-sama bicara tentang agama untuk semesta. Gus Dur menyampaikan bahwa merusak alam sama dengan merusak kemanusiaan,” ujar Alissa saat membuka kegiatan.

Plt Sekretaris Jenderal KAICIID António de Almeida-Ribeiro menuturkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan ruang perjumpaan strategis bagi komunitas lintas iman dan budaya untuk membangun kepercayaan dan aksi bersama.

Merujuk studi nasional KAICIID tahun 2026 mengenai praktik pelestarian lingkungan di Indonesia, berbagai inisiatif komunitas lintas iman telah memberi kontribusi nyata di lapangan, tetapi masih membutuhkan pengakuan kelembagaan serta integrasi ke dalam proses perumusan kebijakan publik agar berdampak jangka panjang.

Dalam pidato kuncinya, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penguatan konsep ekoteologi serta perubahan cara pandang umat beragama dalam membaca kitab suci dan memperlakukan alam. Menurut dia, pendekatan teologis selama ini kerap bersifat antroposentris dan eksploitatif di mana alam hanya dipandang sebagai objek untuk dikuasai.

”Ketika alam hanya dipandang sebagai objek eksploitasi, hutan hanya dihitung berdasarkan nilai ekonominya, dan sungai diperlakukan sebagai saluran pembuangan, pembangunan berisiko kehilangan dimensi etik dan kemanusiaannya,” kata Nasaruddin.

Ia menambahkan, Kementerian Agama mulai mengarusutamakan nilai pemeliharaan alam melalui pengembangan buku panduan ekoteologi lintas agama, penyusunan materi khotbah keagamaan, hingga integrasi kurikulum cinta di lembaga pendidikan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengakui bahwa Indonesia tengah menghadapi tiga krisis sekaligus, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan. Pemerintah, lanjutnya, menjadikan konsep pertobatan ekologis sebagai fondasi kejujuran dalam mengevaluasi perizinan, memperketat pengawasan korporasi, serta melibatkan komunitas agama dan masyarakat adat dalam pelestarian alam.

”Karena regulasi saja tidak cukup. Aturan bisa memaksa, tetapi hanya kesadaran yang membuat orang tetap menjaga alam ketika tidak ada yang mengawasi,” ujar Jumhur.

Jumhur menawarkan tiga skema kolaborasi konkret bagi komunitas lintas iman dan masyarakat adat, meliputi pelibatan rumah ibadah serta pesantren dalam Program Kampung Iklim (Proklim), pembukaan kanal pengaduan pelanggaran lingkungan, serta pembentukan Forum Koordinasi Aksi Lingkungan Lintas Iman bersama Kementerian Agama.

Dalam diskusi panel, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyoroti pembangunan yang meminggirkan masyarakat adat. Ia mengingatkan bahwa masyarakat adat di seluruh dunia menjaga sekitar 80 persen ekosistem

terbaik yang tersisa melalui hukum dan pengetahuan lokal. Ia mendorong pemerintah memberikan pengakuan dan ruang kelola yang adil bagi masyarakat adat tanpa mengorbankan ruang hidup mereka atas nama ekonomi.

”Taman nasional yang dijaga oleh pemerintah banyak yang rusak, sementara yang masih baik itu justru tempat-tempat yang dijaga oleh masyarakat adat. Jadi serahkanlah itu kepada masyarakat adat untuk dijaga,” ucap Rukka.

Pada hari kedua, kegiatan ini mendiskusikan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh para pihak untuk mendukung terwujudnya alam yang lestari.

Salah satu rekomendasinya adalah mendorong tokoh lintas iman di berbagai tingkatan untuk menyuarakan keberpihakan secara tegas dan lugas terhadap pelestarian alam serta berdialog langsung dengan pemangku kebijakan.

Selain itu, forum ini juga mendesak pemerintah untuk memperkuat landasan hukum serta meningkatkan sumber daya dan dukungan anggaran untuk menangani krisis ekologi. Forum ini sekaligus merekomendasikan adanya ruang yang berkelanjutan yang bisa mempertemukan multipihak untuk bersama-sama melakukan aksi-aksi pelestarian lingkungan.

Baca Artikel Asli di Website

Tentang islamsantun.org:
Portal media yang berdedikasi menyebarkan diskursus Islam yang ramah, moderat, dan *rahmatan lil 'alamin*. Menyajikan ragam artikel keislaman, opini, khutbah, hingga sastra pesantren, islamsantun.org hadir sebagai rujukan literasi keagamaan yang sejuk dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Ditulis oleh **islamsantun**

islamsantun.org adalah situs resmi yang dibuat oleh Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM-PIN) UIN Raden Mas Said Surakarta. Pembuatan website ini adalah tindak lanjut dari kampanye Literasi Islam Santun dan Toleran (LISAN) yang digaungkan sejak tahun 2018. islamsantun.org siap berkolaborasi dengan berbagai pihak yang menyuarakan perdamaian dan sikap moderasi beragama

© 2026 islamsantun.org · Menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin